

BAB II

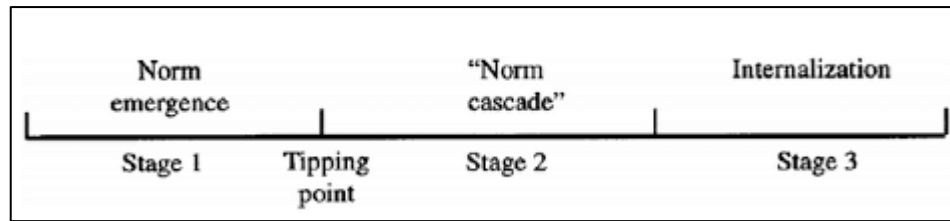
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori atau Konsep

a. Norm Life Cycle Theory

Penelitian ini selanjutnya menggunakan Teori *Norm Life Cycle* dalam menelaah interaksi politik atau interaksi diplomatis antara Rusia dan AS dalam agenda politik LGBTQIA+. Adanya sistem multi-agen yang timbul dalam pola interaksi hubungan internasional berkaitan dengan muncul dan berkembangnya teori *norm life cycle* dalam hubungan Internasional. Karena sistem multi-agen ini terinspirasi dari pola interaksi sosial Masyarakat, sistem ini pada akhirnya tidak hanya mengadaptasi mekanisme koordinasi seperti konvensi dan norma, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana norma-norma tersebut muncul, menyebar, dan berubah dari waktu ke waktu. *Norm Life Cycle* meninjau mengenai kajian komprehensif serta dinamika dalam sistem multi agen yang normatif. Norma akan selalu berubah di tengah-tengah masyarakat seiring berjalannya waktu. Norma yang telah lama atau tidak sesuai dapat dicabut, digantikan dengan norma yang baru, atau dimodifikasi sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada saat itu. Perubahan norma memberikan fokus khusus pada definisi mekanisme yang dibutuhkan di dalam sistem multi-agen tersebut (Frantz & Pigozzi, 2018). *Norm life cycle* yang dikemukakan oleh Finnemore dan Sikkink merupakan salah satu teori yang paling dikenal dan merupakan awal dari perkembangan teori *norm life cycle*. Finnemore dan Sikkink menjelaskan kemunculan norma-norma baru dan pergeseran norma yang berdasar pada beberapa pertanyaan utama seperti dari mana norma-norma itu berasal, bagaimana norma-norma itu berubah, dan apa peran yang dimainkan norma dalam perubahan politik. *Norm life cycle* oleh Finnemore dan Sikkink dibagi menjadi tiga tahap yaitu *norm emergence*, *norm cascade*, and *internalization* (Richter, 2018).

Gambar 1. Tahapan dalam penyebaran suatu norma menurut Finnemore dan Sikkink



Sumber: Finnemore & Sikkink, 1998, p. 896.

Dalam membuat analisa mengenai interaksi antara Rusia dan AS di dalam agenda akseptansi LGBTQIA+ secara global ini dapat dikorelasikan dengan teori *Norm Life Cycle*. *Norm Life Cycle* secara garis besar menjelaskan mengenai bagaimana sebuah norma (dalam konteks penelitian ini bentuknya berupa LGBTQIA+) dibentuk dan muncul di tengah-tengah masyarakat. Dalam penjelasannya, Finnemore dan Sikkink berasumsi bahwa perpindahan norma itu sendiri (dari *emergence* menuju *cascade*) hanya akan terjadi apabila norma tersebut telah diterima oleh sejumlah aktor atau dikatakan sebagai *threshold point*, dan sebuah norma tidak selalu menyelesaikan suatu *life cycle*. Kemudian, Ketika norma tersebut tidak dapat diterima oleh aktor-aktor tertentu atau tidak mencapai *threshold point*, maka norma tersebut tidak akan berpindah dari *emergence* menuju *cascade*. Tahapan-tahapan yang berbeda dari model Finnemore dan Sikkink didukung oleh contoh-contoh yang berasal dari gerakan hak pilih Perempuan (*women's movement of suffragettes*) dan hukum perang (Frantz & Pigozzi, 2018). Teori ini kemudian juga dapat direfleksikan melalui interaksi politik yang terjadi antara AS dan Rusia di dalam agenda politik LGBTQIA+ antar kedua negara.

1. *Norm Emergence*

Pada tahap awal pembuatan norma, *norm entrepreneur* merupakan aktor yang berpengaruh dalam tahapan ini. Selaku agen atau aktor yang berkomitmen untuk membujuk massa untuk mendukung norma-norma baru atau mengubah norma-norma yang sudah ada untuk mencapai perilaku yang diinginkan dalam suatu negara atau komunitas. Sebagai contoh, Finnemore dan Sikkink menyebutkan Henry Dunant yang berperan penting dalam pembentukan norma non-kombatan terhadap dokter dan tantara yang terluka (Frantz & Pigozzi, 2018). Menurut Finnemore dan Sikkink, *norm entrepreneur*

yang sebelumnya dijelaskan merupakan aktor yang bertindak dalam platform organisasi seperti LSM. *Norm entrepreneur* selaku agen yang berperan untuk mempromosikan norma yang ia miliki. Ketidak pastian penerimaan norma di Masyarakat juga pada akhirnya menjelaskan mengapa *norm entrepreneur* sering kali melakukan tindakan kontroversial atau bahkan ilegal. Hal ini kemudian dapat ditunjukkan pada sikap Joe Biden dalam menyuarakan akseptansi kelompok LGBTQIA+ yang bahkan ditujukan kepada negara-negara konservatif seperti Rusia. Dalam beberapa pidatonya, Joe Biden menyuarakan bahwa akseptansi ini merupakan bentuk perbaikan kepemimpinan moral bagi pemimpin-pemimpin tersebut (Bertrand et al., 2021). Dalam kasus ini, dapat dikatakan bahwa peran Joe Biden sebagai *norm leader* berpengaruh terhadap penyebaran norma-norma dan akseptansi LGBTQIA+ secara global.

2. *Norm Cascade*

Setelah *threshold point* dalam *norm emergence* berhasil dilewati, maka norma tersebut berhasil memasuki tahapan *cascade*. Dalam tahap ini, tingkatan penerimaan norma di tengah individu-individu akan meningkat dengan cepat. Dalam *cascading*, mekanisme yang digunakan untuk penerimaan suatu norma tertentu adalah semacam persuasi yang dilakukan oleh aktor/agen tertentu kepada pihak lain yang seharusnya menerima norma tersebut. Dalam konteks negara, bujukan atau persuasi tersebut akan bersandar pada kebutuhan negara untuk diakui sebagai anggota dari organisasi Internasional. Negara tentunya memiliki keinginan untuk memperoleh atau meningkatkan legitimasi secara internal dan internasional. Hal ini dapat digambarkan dengan persuasi Joe Biden dalam beberapa *speech act* yang dilakukannya untuk meningkatkan konsep anti-diskriminasi terhadap kelompok LGBTQIA+. *Pressure of conformity* serta keinginan untuk meningkatkan harga diri yang juga menjadi kebutuhan para *norm leaders* menjadi alasan utama dari perilaku tersebut (*cascading*).

Namun kemudian, seperti yang sudah dijelaskan dalam premis sebelumnya bahwa sebuah norma belum tentu dapat diterima di tengah-tengah masyarakat, dan internalisasi belum tentu tercapai secara mudah. Hal ini disebabkan oleh adanya peran dari *norm protector* di tengah-tengah

Masyarakat tersebut. Ada berbagai hambatan yang muncul dan menyebabkan tidak tercapainya tahap internalisasi dari suatu norma. Hambatan ini dapat berupa ke tidak setuju akan adanya suatu norma di tengah-tengah masyarakat karena kuatnya pengaruh norma yang sudah dimiliki sebelumnya, atau pertentangan dengan aturan pemerintah yang juga berdasarkan oleh nilai-nilai tradisional dari negara tersebut, yang menyebabkan adanya legitimasi atas norma yang sudah dimiliki oleh negara tersebut.

3. *Internalization*

Jika pada akhirnya norma mencapai tahap ketiga atau tahap terakhir, maka pada akhirnya norma tersebut telah di internalisasi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai tahapan ketika norma tersebut telah sepenuhnya diterima dan tidak lagi menjadi objek perdebatan. Setelah norma tersebut diterima, maka individu akan menyesuaikan diri mereka tanpa benar-benar memikirkannya atau tanpa pertimbangan apapun.

Konteks internalisasi ini dapat digambarkan dengan adanya akseptansi kelompok LGBTQIA+ di tengah-tengah Masyarakat Rusia. Walaupun terdapat banyak opresi dari pemerintah yang ditujukan untuk kelompok LGBTQIA+, bahkan hingga pemberian label sebagai kelompok ekstremis, kelompok ini masih tetap berjuang untuk menyuarakan akseptansi mereka pada level politik/pemerintahan (Litvinova, 2024).

b. **LGBTQIA+ politics sebagai alat diplomasi Amerika Serikat**

Saat ini agenda politik LGBTQIA+ menjadi suatu hal yang sering kali dipraktikkan dari kelompok pemerintahan negara-negara barat sebagai suatu strategi dalam hal *bargaining position* untuk mereka, dengan dalih bahwa politik LGBTIA+ merupakan salah satu bagian dari upaya menghapuskan diskriminasi dari berbagai kelompok, dan bentuk dari promosi akan kebebasan berekspresi bagi suatu individu yang harus dihargai. Dalam praktiknya sendiri, politik LGBTQIA+ didukung oleh LSM-LSM barat yang turut dibantu oleh adanya gerakan LGBTQIA+ lokal membentuk pola politik transnasional yang majemuk, kemudian menciptakan suatu bentuk aturan baru mengenai cara negara mengatur dan melindungi negaranya. Politik ini selanjutnya mempromosikan bahwa individu-individu yang termasuk ke dalam golongan

LGBTQIA+ bukanlah minoritas yang hina, namun sebagai pembawa hak asasi manusia dengan harkat dan martabat yang harus dihargai, dan sebagai salah satu simbolisasi dari “kebebasan berekspresi” (Thiel, 2014).

Dalam konteks *mass democracies*, komunitas-komunitas yang terpinggirkan atau *marginalized* cenderung mencari cara untuk menarik opini kelompok mayoritas untuk mengamankan hak-hak mereka. Salah satu strategi yang biasanya digunakan oleh kelompok tersebut adalah *respectability politics*, di mana dalam strategi ini, kelompok tersebut menunjukkan bahwa mereka bukan kelompok yang hadir untuk menolak norma yang ada di tengah-tengah masyarakat, melainkan hadir sebagai kelompok yang turut mengikuti norma dan aturan, tidak memberikan ancaman dan berperilaku “pantas”. Dari strategi tersebut, kelompok terpinggirkan ini berharap bahwa kelompok dominan/mayoritas akan melihat kesamaan dengan kelompok yang terpinggirkan dan akhirnya menganggap mereka dapat memiliki hak yang sama. Selain itu, kelompok-kelompok ini biasanya akan menyoroti anggota-anggota mereka yang paling dihormati seperti tokoh-tokoh penting dan menekankan bagaimana mereka mengikuti nilai-nilai yang ada pada kelompok yang dominan (Jones, 2022). Hal ini juga menjadi strategi yang diadopsi oleh kelompok LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer) dalam beberapa dekade terakhir, dengan tujuan untuk mencoba dan memenangkan dukungan dari kelompok heteroseksual di AS.

Dalam rekam jejaknya, AS (di bawah kepemimpinan Joe Biden) telah mengeluarkan banyak *project* serta aturan-aturan yang berlaku secara domestik maupun internasional yang dapat menunjang keselamatan serta akseptansi kelompok LGBTQIA+. Dengan berbagai klaim yang dilontarkan Joe Biden dalam beberapa konferensinya, seperti *These are our kids. These are our neighbors* untuk kelompok LGBTQIA+ tersebut, serta *unjustified and ugly* untuk negara-negara yang masih tidak terbuka akan akseptansi kelompok ini (Superville, 2023). Joe Biden juga memberikan fasilitasi kesehatan (perlindungan untuk pasien medis gay dan transgender, yang melarang penyedia layanan kesehatan dan perusahaan asuransi yang didanai oleh pemerintah federal untuk melakukan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender) (Weiland, 2024), perlindungan dari diskriminasi di berbagai

lembaga pendidikan, serta perlindungan lainnya yang dapat memberikan kesuksesan perlindungan kelompok LGBTQIA+.

B. Review Literatur

a. Cultural and geopolitical conflicts between the West and Russia: Western NGOs and LGBTQIA+ activism (Radzhana Buyantueva)

Penelitian ini berfokus pada keterkaitan antara LSM negara-negara barat dan juga aktivis LGBTQIA+ Rusia dalam agenda penyebarluasan konsep-konsep atau ideologi liberalisme (yang ditandai oleh akseptansi LGBTQIA+ dari pihak masyarakat Rusia) di Rusia, yang tidak dapat tercapai karena adanya pengaruh konsep geopolitik antara Rusia dan negara-negara Barat. Masuknya LSM Barat ke dalam masyarakat Rusia dipengaruhi oleh perubahan kebijakan luar negeri dan orientasi geopolitik negara. Adanya aspirasi Rusia pada akhir 1980-an hingga 1990-an untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Barat telah membuka jalan bagi LSM Barat untuk membantu pengembangan masyarakat sipil di negara tersebut. Namun, sejak saat itu, hubungan antara Barat dan Rusia menjadi dingin secara signifikan. Selain pengaruh besar dari adanya perang dingin, pengaruh perkembangan geopolitik (seperti perluasan NATO dan Uni Eropa, serta “revolusi warna”) memiliki dampak yang signifikan terhadap sikap Kremlin (kelompok pemerintahan Rusia) terhadap interaksi negara-negara Barat terhadap Rusia (Buyantueva, 2022).

Secara garis besar, keterlibatan LSM Barat di dalam masyarakat sipil Rusia serta berkembangnya aktivis LGBT di Rusia dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri dan orientasi geopolitik negara. Wacana konservatif anti-Barat Kremlin dan perubahan legislatif (misalnya, hukum "*foreign agent*", hukum "*undesirable organisations*") telah memengaruhi hubungan internasional aktivis LGBT Rusia sehingga mengganggu kemungkinan kerja sama dengan mitra-mitra Barat. Sejak awal 1990-an, LSM-LSM Barat telah menawarkan dukungan materi dan non-materi kepada para aktivis dan organisasi LGBT Rusia, serta melakukan lobi-lobi untuk tekanan internasional terhadap negara Rusia. Namun, dalam dua dekade terakhir, Kremlin telah melakukan upaya yang konsisten untuk menghalangi bantuan Barat kepada masyarakat sipil Rusia, termasuk organisasi dan aktivis LGBT. Penelitian ini selanjutnya akan membantu dalam pembahasan mengenai perkembangan gerakan LGBTQIA+

di dalam masyarakat Rusia selaku negara yang dikenal sebagai negara konservatif.

b. Vladimir Putin dan Dekonstruksi Soft Power Rusia (Mohammad Dziaqie Aulia Al Farauqi)

Vladimir Putin merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dan terkenal dengan strategi *hard diplomacy* untuk mencapai tujuan negaranya. Dalam penelitian ini, peneliti mengaitkan perspektif pos modernisme dan rekonstruksi *soft power* yang dimiliki oleh Vladimir Putin. Dekonstruksi ini muncul akibat adanya cara pandang Putin terhadap negara luar dan negara Rusia sendiri sebagai penentang besar akan liberalisasi atau paham barat yang dimiliki oleh AS. Vladimir Putin menganggap bahwa penggunaan *soft power* adalah suatu metode yang kompleks dalam hal mencapai tujuan luar negeri suatu negara yang dimana hal ini didukung dengan adanya penguatan sistem informasi dan media tanpa melibatkan penggunaan senjata di dalamnya. Hal ini kemudian bertentangan dengan status quo yang ada di Rusia, dimana Putin sendiri membatasi aksesibilitas publik terhadap media (Alfarauqi, 2017).

Selanjutnya penelitian ini memberikan *disclosure* mengenai bagaimana Rusia membangun konsep *soft power a la* Rusia yang dinamakan *Rossotrudnichestvo*, yang ditujukan sebagai bentuk respons terhadap kegiatan *NGO's* barat atau agen *soft power* dengan potensi dapat memanipulasi opini masyarakat untuk melakukan campur tangan secara langsung dalam urusan kebijakan domestik dari negara-negara yang berdaulat untuk kemudian ikut campur dengan isu-isu politik di negara lain.

Penelitian ini memiliki kontribusi dalam menelaah sikap Rusia dalam agenda politik LGBTQIA+ yang dimiliki oleh AS, mengetahui bahwa kedua negara memiliki tensi yang sangat tinggi dalam berbagai agenda terutama dalam penyebaran ideologi-ideologi (liberal atau konservatif) antar kedua negara.

c. The Global Dialectics of Homonationalism and Homophobia (Hadley Z. Renkin & Victor Trofmov)

Pada 25 Juni 2020, di awal *queer Pride Month*, Kedutaan Besar AS di Moskow mengibarkan *rainbow flag* (bendera khas kelompok LGBTQIA+) di gedungnya, sebagai simbol dukungan untuk kelompok LGBTQIA+ sekaligus menjalankan misi diplomatik AS bersamaan dengan kedutaan dan konsulat AS

di seluruh dunia. *Pride month* di tahun itu bertepatan dengan adanya pemungutan suara untuk amandemen Konstitusi Rusia yang secara eksplisit mendefinisikan pernikahan sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan. Pengibaran bendera Pelangi oleh Kedutaan Besar AS menimbulkan kontroversi yang cukup kuat, yang juga memperumit hubungan AS dan Rusia yang sudah tegang sebelumnya. seorang senator Rusia dan pakar TV konservatif menafsirkan bendera tersebut sebagai salah satu bentuk campur tangan AS secara langsung dalam urusan dalam negeri Rusia.

Secara garis besar, penelitian ini menganalisis interaksi antara negara-negara “liberal” dengan negara-negara konservatif yang tidak memberi akseptansi atau hak-hak terkait kelompok LGBTQIA+ di negaranya. Dapat ditelaah bahwa interaksi di antara kedua jenis negara (terutama dalam agenda *contemporary sexual politics*) dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti kondisi geopolitik antar negara, hubungan negara secara lokal (internal) dan global dari negara tersebut (Renkin & Trofimov, 2023). Penelitian ini kemudian menjawab mengapa interaksi yang terjadi pada negara-negara tersebut dapat terjaln walaupun kedua pihak memiliki paham yang jauh berbeda antara satu sama lain.

d. LGBT Rights Activism and Homophobia in Russia (Radzhana Buyantueva)

Pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, persepsi kelompok LGBT Rusia tentang masyarakat yang menjadi lebih toleran membantu keputusan mereka untuk mulai berpartisipasi dalam gerakan aktivisme. Namun, hal itu berubah ketika sikap masyarakat terhadap hubungan sesama jenis menjadi semakin tidak toleran dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu alasan utamanya adalah pengaruh wacana konservatif negara yang diwujudkan dalam pengesahan undang-undang propaganda anti-gay. Elit agama dan politik menggunakan argumen nilai-nilai tradisional dan retorika homofobia, yang dianggap bermanfaat untuk menarik dukungan publik. Pelecehan dan kekerasan terhadap kelompok LGBT yang dilakukan oleh anggota kelompok dan individu nasionalis dan homofobia serta pihak berwenang memberikan gambaran yang mengganggu tentang meningkatnya homofobia di negara ini, yang memengaruhi kesiapan kelompok LGBT untuk bergabung dalam aktivisme.

Aktivisme hak-hak LGBT Rusia berada dalam lingkungan yang tidak bersahabat (Buyantueva, 2018).

Penelitian ini selanjutnya akan memberikan eksekusi terhadap adanya gerakan anti-LGBTQ dari berbagai lapisan Masyarakat dan bagaimana perkembangan penolakan gerakan LGBT di Rusia secara kronologis.

C. Kebaruan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada pola komunikasi politik dari kedua negara dengan *impact* yang berfokus pada kedua negara tersebut. secara garis besar, penelitian ini tidak hanya membahas mengenai interaksi politik, namun juga membahas mengenai dampak dari Internasionalisasi tersebut, mengingat pada saat ini LGBTQIA+ menjadi suatu arah politik yang cukup menarik untuk ditelaah karena kompleksitas dari penyebaran serta akseptansinya serta berbagai pertentangan yang terdapat dalam proses interaksi hukumnya. Pada literatur-literatur sebelumnya hanya dibahas bahwa adanya politik LGBTQIA+ di suatu negara pastinya sebagian besar akan dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi di dalam level sosial masyarakat (seperti pada beberapa karya Buyantueva yang menjelaskan bahwa gerakan aktivisme di Masyarakat berperan besar dalam akseptansi LGBTQIA+ di Rusia), yang kemudian menjadi suatu titik tumpuan dalam penelitian ini untuk membuktikan bahwa adanya agenda politik LGBTQIA+ tidak hanya berangkat dari satu level interaksi saja, melainkan terdapat pola interaksi lain yang menyebabkan dinamika akseptansi LGBTQIA+ sebagai suatu hukum di dalam negara.

Adapun penelitian sebelumnya dengan judul *Cultural and geopolitical conflicts between the West and Russia: Western NGOs and LGBTQIA+ activism* yang ditulis oleh Radzhana Buyantueva menjelaskan mengenai interaksi antara *NGOs* negara-negara barat dan aktivis LGBTQIA+ Rusia dalam agenda penyebar luasan akseptansi LGBTQIA+. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penyebaran paham liberal di Rusia dibantu oleh badan LSM barat, yang mempromosikan “kebebasan” tersebut di level masyarakat, yang salah satu agendanya adalah promosi mengenai LGBT dan akseptansinya di masyarakat.